









## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Otong Suparman dan Ibunda Entin Suhartini yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya, serta selalu memberikan dorongan semangat dan finansial selama anak-anaknya menuntut ilmu. Terimakasih telah menjadi orang tua yang terbaik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, rizki dan ridho yang terbaik dalam setiap langkahnya.
2. Kepada kedua kakak, Evi Nurhayati dan Ahmad Abdul Holik yang telah memberikan dukungannya untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
3. Kepada almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu peneliti banggakan. Terimakasih atas ilmu, pengalaman dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Khususnya keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah menerima peneliti untuk menjadi bagian dari keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN MOTTO

*“Pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang buruk berkuasa.”*

(Franz Magnis Suseno, SJ)

*“menjadi politikus itu tidaklah haram, namun menyalah gunakan kekuasaan itulah yang dapat membuatnya menjadi haram.”*

(Muhamad Wisnu Haidir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tahun 2018 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia pasalnya ditahun ini putra putri terbaik bangsa akan berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sebanyak 171 Daerah yang terbagi dalam 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten akan meramaikan pesta demokrasi tersebut.<sup>1</sup>

Sejarah pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau sering disebut pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 atas dasar hukum Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilatar belakangi oleh aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah secara demokratis dari ketidaksempurnaan Undang-Undang No.22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Dahulu sebelum disahkannya Undang-Undang No.32/2004 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akibatnya rakyat tidak bisa memilih kepala daerahnya secara langsung melainkan terwakilkan. Seiring berjalannya waktu penyempurnaan dan evaluasi terus diupayakan agar terlaksanya

---

<sup>1</sup> <https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/192813-daftar-daerah-pilkada-2018>. Diakses pada 8 maret 2018

demokrasi sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang No.32/2004 tidak serta merta langsung menciptakan pilkada langsung, namun harus melalui proses *judicial review* atas undang-undang tersebut, atas dasar itu pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.3/2005 yang akhirnya juga berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah no.6/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkada Langsung menjadi Peraturan Pemerintah No.17/2005.

Pada tahun 2007 terbit Undang-Undang No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini pemilihan kepala daerah bukan lagi bagian dari otonomi daerah akan tetapi, dimasukkan dalam bagian pemilihan umum (pemilu) dibawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional. Sehingga masyarakat lebih mengenalnya sebagai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada). Kemudian pada tahun 2011 pemerintah melalui Undang-Undang No.15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengubah dari yang sebelumnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Saat ini pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merujuk pada Undang-Undang No.10/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pilkada serentak tahun 2018 kali ini masuk kedalam kategori gelombang tiga, sebelumnya pada tahun 2017 pilkada serentak sudah berlangsung di 101 daerah dan pada tahun 2015 berlangsung di 269 daerah. Tiga Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk ke dalam 171 Daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada bulan Juni tahun 2018.

Pertarungan politik di Pulau Jawa sangat kental sekali, letak yang strategis dan banyaknya jumlah pemilih aktif, membuat para elit politik bertarung secara keseluruhan. Apabila jumlah ketiga Provinsi ditotal hampir dari separuh jumlah penduduk di Indonesia itu artinya Pulau Jawa dapat dijadikan sebagai kekuatan/kunci untuk pijakan politik selanjutnya baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif (Presiden dan wakil presiden).

Di Provinsi Jawa Tengah pemilihan gubernur sudah berjalan selama dua kali pemilihan sejak Undang-Undang terkait pemerintahan daerah diberlakukan. PDIP menjadi partai tersukses dalam perhelatan tersebut. Kekuatan yang besar dan basis pendukung yang tersebar di setiap kabupaten/kota menjadikan PDIP selalu berhasil meraih suara terbanyak. Terhitung sejak pemilihan Gubernur pertama tahun 2008

PDIP mengusung pasangan Bibit Waluyo dan Rusriningsih untuk maju dalam pilgub Jateng melawan koalisi dari partai lain, hasilnya Bibit/Rusri mampu menang dengan hampir mengantongi 50% suara pemilih di Jawa Tengah.

Akan tetapi, ketidak harmonisan Bibit Waluyo dengan PDIP pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur, berimbas pada tidak diusungkannya kembali oleh PDIP pada pemilihan gubernur 2013. Bibit Waluyo memilih maju mencalonkan diri kembali melalui jalur partai lain. Sebagai gantinya PDIP mengusung kadernya sendiri Ganjar Pranowo yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode pada tahun 2004-2013 untuk maju berhadapan dengan petahana Bibit Waluyo yang periode sebelumnya diusung PDIP.

Walaupun calon yang diusung PDIP tergolong baru, elektabilitas dan popularitasnya jauh dari mantan petahana Bibit Waluyo. Namun, PDIP berhasil membuktikan bahwa Jawa Tengah merupakan kandang banteng atau basis terbesarnya PDIP terbukti dengan terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur dan berhasil mengalahkan pesaing lainnya dengan capaian hampir 50% suara.<sup>2</sup>

Tak hanya sukses dalam pemilihan Gubernur, PDIP juga berhasil memperoleh 31 kursi di DPRD Jawa Tengah pada pemilu legislatif tahun

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/politik/kpu-jateng-ganjar-heru-menang-dengan-4882-persen-suara.html>. Diakses pada 8 maret 2018

2014. Namun, besarnya suara PDIP nampaknya tidak bertahan lama. Elektabilitas PDIP saat ini berangsur turun yang sebelumnya pada bulan Agustus 2017 memasuki angka 28,3% menjadi 22,2% pada Januari 2018 (LSI).<sup>3</sup>

Beberapa factor kemungkinan menurunnya elektabilitas PDIP. Pertama, munculnya tudingan PDIP adalah PKI. Kasus ini berawal dari cuitan akun twitter Alfian Tanjung yang menyebutkan sebanyak 85% anggota PDIP adalah PKI. Hal ini menurut Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Krisyanto menyebabkan elektabilitas partainya mengalami penurunan secara drastis.<sup>4</sup> Kedua, karena factor pernyataan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat HUT ke-44 PDIP tentang ideology tertutup menuai protes dari sebagian umat Islam.<sup>5</sup>

Dari paparan data diatas membuat PDIP mendapatkan stigma negative dari sebageian umat Islam yang diperkuat dengan munculnya gerakan aksi bela Islam 212 yang juga mempunyai agenda politik menumbangkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang diusung oleh PDIP. Selain itu mereka juga membuat

---

<sup>3</sup> <http://www.demokrasi.co/2018/01/survey-terbaru-lsi-pdip-mengalami.html?m=1>.

Diakses pada 9 Maret 2018

<sup>4</sup> <https://viva.co.id/berita/politik/1004645-disebut-oki-elektabilitas-pdip-turun-drastis>. Diakses pada 9 Maret 2018.

<sup>5</sup> <https://m.liputan6.com/news/read/2835928/ini-isi-pidato-megawati-yang-dilaporkan-lsm-ke-bareskrim>. Diakses pada 9 Maret 2018.

propaganda jangan memilih partai dan calon presiden yang mendukung penista agama dan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui pada pilgub DKI Jakarta 2017 Ahok yang diusung oleh PDIP berhasil dikalahkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung koalisi partai Gerindra dan PKS. Pada pilgub Jawa Tengah 2018 ini PDIP mencalonkan kembali Petahan Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur melawan Sudirman Said yang dicalonkan oleh koalisi Partai Gerindra, PKS dan PAN yang pada tahun 2017 lalu menjadi tim sinkronisasi pasangan Anies/Sandiaga di pilgub DKI Jakarta dengan koalisi partai yang sama.

Tidak sedikit umat islam yang berada di Klaten berangkat menuju Jakarta untuk ikut dalam massa Aksi Bela Islam secara langsung. Sebagian umat Islam yang tidak ikut menuju Jakarta mereka menggelar Aksi Bela Islam yang serupa di Jakarta yang dilakukan di depan Masjid Agung Al-Aqso Klaten.<sup>7</sup>

Tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi pengurus dan kader PDIP Kabupaten Klaten karena pada pilgub tahun 2013 PDIP Kabupaten Klaten dengan mengangkat Pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjarmoko dengan melawan 2 cagub dan cawagub hanya mampu mengumpulkan 301.504 suara atau (55,35%) dari total pemilih di

---

<sup>6</sup><https://nusantara.rmol.co/2018/01/13/322181/warna-pilkada-jawa-tengah-bakal-adopsi-kampanye-jakarta>. Diakses pada 9 Maret 2018.

<sup>7</sup><https://soloraya.solopos.com/read/20161202/493/773404/demo-2-desember-ratusan-umat-islam-klaten-ke-jakarta-demi-212>. Diakses pada 9 Mei 2019.

Kabupaten Klaten ditambah lagi dengan pernyataan ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten Sunarna telah menargetkan kemenangan sebanyak 75% lebih untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimun pada pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena di Kabupaten Klaten tidak sedikit masyarakat muslim yang ikut kedalam aksi bela Islam baik yang dilakukan di Jakarta maupun di Klaten dan juga berbagai isu-isu yang mengarah kepada PDIP yang menyebabkan elektabilitas partai cenderung menurun baik dalam skala regional maupun nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana **"Komunikasi Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten untuk Mendapatkan Suara Pemilih Muslim pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018"** setelah beberapa tahun terakhir PDIP mendapat berbagai stigma negative dan efek dari Pilkada DKI Jakarta yang mengakibatkan menurunnya jumlah pemilih sehingga berdampak pada kekalahan partai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Memperoleh Suara Pemilih Muslim pada Pilgub Jawa Tengah 2018?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Memperoleh Suara Pemilih Muslim pada Pilgub Jawa Tengah 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah perkembangan kajian keilmuan tentang komunikasi politik khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mampu menambah pemahaman peneliti mengenai komunikasi politik.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan maupun referensi bagi masyarakat/pembaca yang sudah atau ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui jalur politik praktis.

#### E. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang dipergunakan peneliti sebagai komparasi sekaligus sebagai rujukan pada penelitian. Berikut beberapa hasil dari tinjauan pustaka yang peneliti rangkum untuk mempermudah proses analisis.

1. Jurnal oleh Fahri Uber, PH. Regar, G.J Waleleng dengan judul “Strategi Kampanye Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Satu Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2004”.<sup>8</sup> Penelitian ini berdasarkan tentang komunikasi politik, komunikasi kelompok, komunikasi antar pribadi dan menggunakan analisis *strength weakness Opportunities threats* (SWOT). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye yang disusun berdasarkan kekuatan/*strength* (S) adalah dengan menggandeng tokoh tokoh masyarakat sebagai jaringan untuk memperoleh dukungan. Berdasarkan kelemahan/*weakness* (W) yaitu partai islam terhambat pada pemilih non islam. Solusinya dengan turun langsung kelapangan guna berinteraksi secara langsung kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup> Uber, Fahri. *Strategi Kampanye calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Satu Kabupaten Minahasa Utara 2014*, Jurnal, (Volume V. No.2, 2016).

Peluang/*Opportunities* (O) menjadikan target di desa desa yang berpenduduk mayoritas muslim sebagai masa/pendukung. Ancaman/*threats* (T) yang mengancam PKB ialah penggunaan politik uang yang dilakukan oleh lawan politiknya dan kecurangan kecurangan lainnya. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu mengenai komunikasi politik. Dilihat dari segi subjek penelitian diatas dilakukan kepada PKB Minahasa Utara sedangkan penelitian ini dilakukan di DPC PDIP Kabupaten Klaten.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Satrio Hutomo dengan judul “Strategi Komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilitasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014”.<sup>9</sup> Teori yang digunakan yaitu teori komunikasi politik. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PDIP melakukan pendekatan social, komunikasi tatap wajah atau *face to face*, kampanye secara massif di media, melakukan komunikasi dengan pengenalan figure melalui alat peraga. Komunikasi tatap muka dijadikan senjata pamungkas dikarenakan pemahaman mereka bahwa dengan cara tersebut dapat mempererat hubungan partai, caleg dan masyarakat Kota Semarang. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Apabila

---

<sup>9</sup>Hutomo, Ridho Satrio, *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilitasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).

penelitian yang dilakukan oleh Ridho Satrio Hutomo lebih bersifat umum memobilisasi masa, penelitian ini lebih khusus untuk memobilisasi masa muslim. Walaupun objek dan metode yang digunakan sama namun hasil penelitian akan berbeda.

3. Jurnal yang diteliti oleh Debie Pratama Saputra dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Menuju Pemilu 2014 di Kabupaten Kubar”.<sup>10</sup> Teori yang digunakan memakai Teori SMCR (*Source Message Channel Receiver*) dan tinjauan pustaka komunikasi politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa calon legislatif dari partai PKB kabupaten Kubar membangun komunikasi bersama masyarakat dengan cara berinteraksi langsung maupun silaturahmi dengan tokoh masyarakat, Ulama, Organisasi Masyarakat, Kalangan Pemuda agar dapat memperluas jaringan partai. Selain itu pengoptimalan media juga terus dilakukan seperti promosi, iklan, kampanye politik maupun membagikan berita kegiatan yang sedang berlangsung. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rifqi Ridho dengan judul “Strategi Komunikasi dalam Perolehan Suara Partai Persatuan

---

<sup>10</sup> Saputra, Debie Pratama, *Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Menuju Pemilu 2014 di Kabupaten Kubar*, Jurnal, Vol, 3 (3): 170-184, 2015.

Pembangunan (PPP) pada pemilu legislative 2009 di Kabupaten Tegal”.<sup>11</sup> Teori yang digunakan memakai teori performa komunikatif. Menggunakan metode deskriptif komunikatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 PPP kabupaten Tegal melakukan strategi politik yang digunakan untuk memperoleh konstituen pada pemilu diantaranya dengan melakukan audiensi dengan organisasi kepemudaan dan keagamaan, selain itu saluran komunikasi politik juga mereka gunakan seperti saluran komunikasi politik struktur tradisional, saluran komunikasi politik input dan saluran komunikasi politik melalui media masa. Perbedaan yang ditemukan yaitu dalam pengambilan teori dan objek yang dituju dan persamaan terdapat pada metode penelitian dan pendekatan.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, maka peneliti merasa perlu memberikan gambaran mengenai teori dan tinjauan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Tinjauan mengenai komunikasi politik, partai politik dan pemilihan umum (pemilu).

### **1. Tinjauan Komunikasi**

Secara etimologi kata komunikasi berasal dari kata *communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.

---

<sup>11</sup> Ridlo, Mochammad Rifqi, *Strategi Komunikasi Politik dalam Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Tegal*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Aristoteles dalam bukunya *Rethoric* membuat definisi komunikasi dengan menekankan kepada kata “siapa mengatakan apa pada siapa”. Berbekal dari definisi Aristoteles kemudian Harold D. Laswell menyempurnakan definisi yang lebih sempurna dengan menanyakan “SIAPA mengatakan APA, MELALUI apa, KEPADA siapa dan apa AKIBATNYA.<sup>12</sup> Sementara Gerbner (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi social yang menggunakan symbol sebagai pesan yang tersistem. Di Tengah keberagaman pengertian komunikasi ada dua hal yang menjadi benang merah yang dapat menyatukan tentang perspektif komunikasi, dimana keseluruhan pandangan diambil dari proses berkomunikasi dengan cara bertatap muka serta proses dengan menggunakan media.<sup>13</sup>

## **2. Tinjauan Politik**

Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok dapat mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan yang ada dalam anggotanya. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur yang tidak

---

<sup>12</sup>Hafied Cagara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*, (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 14.

<sup>13</sup> Fajar Junaedi, *Komunikasi politik; Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), hlm. 20.

lepas dari konflik dan kerjasama.<sup>14</sup> Pengertian politik diatas mengidentifikasikan bahwa dalam dunia politik perlu adanya komunikasi yang efektif agar kegiatan politik berjalan dengan lancar dan meminimalisir terjadinya konflik serta dapat mencapai kesepakatan/makna bersama.

### 3. Tinjauan Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Brian McNair yaitu semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh actor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. Untuk menghindari kajian komunikasi politik tidak hanya berbicara tentang kekuasaan maka Doris Graber menjelaskan dalam tulisannya *Political Language* (1981) bahwa komunikasi tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup symbol-simbol bahasa serta tindakan politik seperti demonstrasi, protes dan boikot.<sup>15</sup> Mengacu dari beberapa pandangan diatas secara keseluruhan komunikasi politik tidak mudah untuk didefinisikan, berkaitan dengan bertambahnya perbedaan sudut pandang maka secara sederhana dapat dikatakan komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh actor politik. Sebagaimana komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga didukung oleh beberapa unsur antara lain komunikator politik,

---

<sup>14</sup> Hafied Cagara, *Komunikasi Politik*. Hlm.30.

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hlm.31.

pesan, komunikasi politik, media/saluran komunikasi politik, dan efek.<sup>16</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Dan Nimmo :

a. Komunikator Politik

Komunikator politik merupakan unsur yang berperan sangat penting dalam suatu kegiatan politik. Komunikator politik tidak hanya menyangkut soal partai melainkan juga lembaga pemerintahan legislative dan eksekutif bisa saja masyarakat *non* politisi. Dengan kata lain komunikator politik dapat terjadi kepada siapa saja yang membawa pesan politik dengan tujuan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Nimmo mengategorikan tiga jenis komunikator, yang pertama yakni politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, Profesional sebagai komunikator politik dan aktivis sebagai komunikator politik.

1.) Politikus sebagai komunikator politik

Menurut Nimmo, politikus sebagai komunikator politik mengarah secara spesifik terhadap calon atau pemegang jabatan, tak peduli mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan jabatan itu baik eksekutif, legislative atau yudikatif. Hal itu disebabkan karena pekerjaan/profesi mereka. Daniel Katz dalam Nimmo menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan

---

<sup>16</sup> Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Penerj: Tjun Sujarman. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). Hlm.14

pengaruhnya ke dalam dua arah, yakni mempengaruhi alokasi anggaran dan mengubah struktur social yang ada atau mencegah perubahan.<sup>17</sup>

## 2.) Profesional sebagai Komunikator politik

Profesional diartikan sebagai golongan *independent* yang melakukan pekerjaan tanpa ada tendensi meraih kekuasaan layaknya politikus. Golongan professional ini tidak ada kaitanya dengan politikus maupun partai politik. Profesional tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh/menempati suatu jabatan di pemerintahan, sehingga hanya berkonsentrasi untuk mengolah dan menyampaikan lambang serta symbol-simbol politik kepada khalayak. Golongan Profesional ini mencakup dua jenis yaitu jurnalis dan promotor. Jurnalis yang mewartakan pesan-pesan politik dari politikus dan menghubungkannya kepada khalayak. Sedangkan Promoter menurut Nimmo adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu, yang termasuk promoter adalah agen publisitas tokoh masyarakat yang penting, personel hubungan masyarakat pada organisasi swasta atau pemerintahan, pejabat informasi public pada jawatan pemerintahan, sekretaris pers kepresidenan, periklanan perusahaan,

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.30.

manager kampanye dan pengarah publisitas kandidat politik, spesialis teknis (kameraman, produser, dan sutradara film) yang bekerja untuk kepentingan kandidat politik.<sup>18</sup>

### 3.) Aktivis sebagai komunikator politik

Dalam pandangan Nimmo Aktivis pada umumnya tidak memegang jabatan pemerintahan.<sup>19</sup> Akan tetapi lebih berbicara pada kepentingan yang terorganisir. Menurut Nimmo komunikator jenis ini biasanya tampil dalam dua bidang. Pertama, mereka sangat mempengaruhi keputusan orang lain artinya seperti politikus dan prometer profesional, mereka meyakinkan orang lain cara pandang/berfikir mereka. Kemudian biasanya meneruskan informasi politik dari media kepada masyarakat umum. Dalam komunikasi dua tahap ini gagasan sering mengalir dari media kepada pemuka pendapat dan dari mereka kepada bagian penduduk yang kurang aktif (Lazarsfeld, 1968: 151)

#### b. Pesan Komunikasi Politik

Pesan dari komunikasi politik dapat berupa ajakan, informasi, imbauan, maupun perintah yang disampaikan oleh komunikator politik kepada komunikan politik disampaikan secara sembunyi maupun terang-terangan, tertulis maupun tidak tertulis, verbal maupun non verbal, disadari maupun tidak disadari yang isinya

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.34.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.36.

mengandung bobot politik. Seperti pidato politik, berita politik, iklan politik, propaganda, pernyataan politik, baliho/spanduk dan semacamnya.

c. Komunikasikan Politik

Komunikasikan atau biasa disebut Khalayak dalam ilmu komunikasi merupakan pihak yang menjadi tujuan disampainya pesan. Dalam sebuah komunikasi politik khalayak didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang berperan sebagai subjek yang dituju oleh komunikator politik supaya pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye politik.<sup>20</sup> Isi pesan yang disampaikan komunikator tertuju kepada komunikasikan. Komunikasikan politik merupakan unsur yang paling penting untuk bisa mencapai suatu tujuan dari komunikasi politik itu sendiri.

d. Media/Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi menurut Kenneth Burke, merupakan alat untuk melancarkan saling tukar pesan. Dalam konteks komunikasi massa saluran politik dapat berbentuk media massa seperti Koran, Televisi, Radio, Majalah hingga Papan Reklame.

Saluran komunikator politik dibedakan menjadi tiga saluran komunikasi berdasarkan kebutuhannya. Saluran komunikasi kelompok meliputi partai politik mulai dari pengurus tingkat

---

<sup>20</sup> Antar Venus, *Managemen Kampanye*. (Bandung: Simbiosis Media, 2004). hlm.36.

Nasional sampai dengan Kelurahan (DPP-DPAC), organisasi social kemasyarakatan, kelompok tani/nelayan, koperasi, persatuan olahraga. Saluran komunikasi Publik meliputi aula, balai desa, gelora, lapangan, stadion, pasar, swalayan, alun-alun. Saluran komunikasi social meliputi pesta perkawinan, acara sunatan, arisan, pesta rakyat yang semuanya itu berhubungan dengan manusia.

e. Efek Komunikasi Politik

Efek atau *feedback* merupakan dampak atas pesan-pesan politik yang disampaikan terhadap khalayak. Efek komunikasi biasanya berdampak pada tindakan/perilaku, afektif, kognitif. Sedangkan dampak dari komunikasi politik menurut Nimmo ada beberapa efek yang dihasilkan setelah pesan politik disampaikan oleh komunikator politik. Efek tersebut seperti adanya partisipasi khalayak dalam politik, kemudian mempengaruhi suara dalam pemilihan umum serta mempengaruhi pejabat dalam membuat kebijakan.<sup>21</sup>

Partisipasi khalayak dalam politik, ialah khalayak ikut serta mengamati, terlibat, berperan serta didalam kegiatan politik. Apabila sebelumnya khalayak buta akan politik mengagap politik adalah hal tabu/kotor, lalu setelah komunikator politik

---

<sup>21</sup> Dan Nimmo. *Komunikasi politik: Khalayak dan Efek*. Penerj Surjaman. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). Hlm. 125-199.

menyampaikan pesan politiknya khayak menjadi terlibat dan tertarik akan politik maka hal itu mengindikasikan ada efek yg diterima.<sup>22</sup>

Dalam konteks pemilu, efek komunikasi politik juga bisa dirasakan pada saat komunikator politik menyampaikan pesan-pesan politik yang berimbas kepada khalayak memberikan dukungan berupa suara pada saat pemilihan. Artinya, pemberian suara oleh khalayak menjadi tanda bahwa mereka mempunyai persepsi yang sama kepada pesan yang disampaikan oleh komunikator politik.<sup>23</sup>

Pejabat pemerintahan merupakan sebuah jabatan politik, mereka di pilih oleh khalayak melalui system pemilihan umum. Pejabat mencalonkan diri melalui partai politik, partai politik mempunyai peranan besar dalam menentukan sebuah pemerintahan. Karena pemerintah terpilih dari partai tidak hanya representasi diri pribadi melainkan juga reperesentase dari partai politik.<sup>24</sup>

#### **4. Tinjauan Partai Politik**

Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.125.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.161.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.199.

merebut kekuasaan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara umum/pengelolaan negara.<sup>25</sup> Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk dapat menciptakan pemerintahan mayoritas, diperlukan partai politik yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka serta siapa yang akan menentukan kebijakan secara umum (*public policy*).<sup>26</sup> Hafied Cagara dalam bukunya komunikasi politik memaparkan tiga prinsip dasar partai politik:

Pertama, partai sebagai koalisi, yakni partai membentuk koalisi/kerjasama dengan partai lain agar bisa membangun kekuatan mayoritas. Koalisi sering dilakukan oleh elit politik untuk mencapai tujuan yang sama walaupun visi-misi antar partai berbeda.

Kedua, partai sebagai organisasi, untuk bisa menjadi organisasi yang eksis, dinamis dan berkelanjutan. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu sebagai wadah perjuangan partai, dengan tujuan untuk bisa menciptakan kader yang mumpuni dan bisa mengambil bagian dalam pemilu sebagai representasi dari partai.

---

<sup>25</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 442.

<sup>26</sup> Hafied Cagara, *Komunikasi Politik*. Hlm. 208.

Untuk itu partai politik melakukan mobilitasi kepada kadernya untuk loyal kepada partai.

Ketiga, Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik mendukung secara konkret calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan public. Dari posisi ini mereka dapat memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan dimana kader partai menduduki posisi politis.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metodologi penelitian yang menggunakan bukti empiris yang real terjadi di lapangan untuk membuktikan apakah suatu teori dapat diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak.<sup>28</sup>

Kelebihan dari pendekatan ini yaitu data yang didapatkan lebih kuat dan kredibel untuk dianalisis lebih lanjut ataupun dipahami oleh pembaca karena pendekatan ini didukung dengan bukti empiris

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>28</sup> Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar, Edisi Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Indeks 2012), hlm. 115.

yang kuat dari sebuah unit analisis. Dengan pendekatan ini peneliti akan menganalisis Komunikasi Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten untuk mendapatkan suara pemilih muslim pada pilgub Jawa Tengah 2018.

## **2. Fokus Penelitian**

Unit analisis merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian atau bisa dikatakan unit yang akan dianalisis dalam sebuah penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPC PDIP Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu partai politik terbesar di Kabupaten Klaten.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus dan Tim Kemenangan Ganjar-Yasin dari DPC PDIP Kabupaten Klaten. Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah komunikasi politik DPC PDIP Kabupaten Klaten untuk mendapatkan suara pemilih muslim pada pilgub Jateng 2018.

## **3. Sumber Data dan Informan Penelitian**

### **a. Sumber Data**

Didalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau wawancara secara langsung untuk memperoleh data relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dasar penelitian (*Primer Reverence*).<sup>29</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua/wakil ketua, Fungsionaris dan Ketua Tim Kampanye pilgub Jawa Tengah 2018 di DPC PDIP Kabupaten Klaten.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil temuan/pengumpulan data sebagai pelengkap data primer (*Sekunder Reverence*).<sup>30</sup> Data sekunder bisa diperoleh melalui buku-buku, notulen rapat, arsip, website, media massa/social dan hasil dokumentasi rekaman video/suara dimana tempat peneliti lakukan.

### b. Informan Penelitian

Informan penelitian ini antara lain:

- 1) Ketua/wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten.
- 2) Ketua Tim kampanye pilgub Jateng 2018 di DPC PDIP Kabupaten Klaten.

---

<sup>29</sup> Marzuqi, *metode Riset* (Yogyakarta: PT. Hamidita, 1997), hlm. 55.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 56.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>31</sup>

##### a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas memperhatikan/mengamati suatu proses kejadian dengan maksud memahami sebuah fenomena untuk mendapatkan informasi penelitian.<sup>32</sup> Ada dua jenis observasi yang pertama berdasarkan tingkat pengontrolan yaitu observasi sederhana dan sistematis. Observasi sederhana merupakan observasi yang tidak terkontrol berdasarkan waktunya dan tidak mempersiapkan alat penelitian terlebih dahulu seperti alat tulis, kamera dan alat perekam. Sedangkan observasi sistematis merupakan observasi yang dilakukan secara terkontrol (memperhatikan tempat dan waktu observasi) dan mempersiapkan alat observasi secara matang, alat.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dimana peneliti melakukan observasi langsung di lapangan serta kantor DPC PDIP Kabupaten Klaten dengan peralatan dan waktu yang sudah dipersiapkan.

---

<sup>31</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 37.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 38.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara interaksi antara peneliti dan informan melalui proses tanya jawab.<sup>33</sup> Ada tiga jenis bentuk-bentuk wawancara berdasarkan pertanyaan yang diajukan yaitu wawancara terbuka, wawancara tertutup dan wawancara tertutup terbuka. Wawancara tertutup biasa digunakan dalam model penelitian kuantitatif data statistic karena pertanyaan yang diajukan menuntut jawaban yang pasti seperti jawaban ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Wawancara terbuka/mendalam adalah wawancara yang tidak membatasi jawabanya. Sedangkan wawancara tertutup terbuka ialah wawancara yang memadukan antara kedua wawancara tersebut.<sup>34</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka/mendalam terhadap informan yang sudah peneliti tetapkan meliputi: Ketua/wakil ketua dan Tim Kemenangan Ganjar-Yasin pada Pilgub Jateng 2018 DPC PDIP Kabupaten Klaten.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mengumpulkan atau menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data hasil penelitian dengan menyertakan bukti-

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

bukti yang telah didapat, bisa berupa dengan rekaman suara/video, gambar, buku, website, naskah berita cetak/online.

## 5. Metode Analisis Data

### a. *Reduksi Data*

Reduksi data merupakan bentuk proses analisis dengan cara menyaring, menggolongkan, menyederhanakan, memilih kembali data yang relevan yang didapatkan di lapangan atau tempat penelitian sehingga hasil kesimpulan sudah dapat digambarkan.<sup>35</sup>

Reduksi data dilakukan dengan meringkas kembali catatan lapangan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berupa data data-data dokumen ataupun hasil rekaman yang telah dikumpulkan dengan memilih hal-hal yang pokok atau penting yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan peneliti mengenai komunikasi politik DPC PDIP Kabupaten Klaten dalam mendapatkan suara pemilih muslim.

### b. *Display Data*

Display Data/Penyajian data setelah proses reduksi data berupa teks naratif yang diperoleh sudah selesai. Selanjutnya dirangkum ke dalam susunan yang lebih sistematis agar dapat diketahui polanya dan untuk mempermudah pola ini maka penelitian disajikan dalam bentuk bagan dan tabel dari hasil penelitian.

---

<sup>35</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 130.

Penyajian data ini bersifat sementara akan ada berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat/baru untuk mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya.

### **c. *Drawing Correlation***

Tahapan selanjutnya setelah melakukan display data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memiliki makna. Proses analisis dilakukan semenjak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau masih kabur. Dengan demikian untuk menetapkan kesimpulan tersebut lebih berakar, maka verifikasi perlu dilakukan dengan maksud untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan *member check* dan triangulasi dan mendapatkan data yg kredibel.

### **d. *Validitas dan Reliabilitas***

Validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif berfokus kepada keabsahan serta kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam melakukan sebuah proyek penelitian.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan untuk menghindari kepalsuan data yang didapatkan saat penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dalam empat kriteria, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

### **1.) Kredibilitas**

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada narasumber sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipercaya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kondisi tersebut tercapai adalah:

### **2.) Triangulasi**

Triangulasi merupakan pengecekan kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data dari sumber lain. Seperti diketahui, informan dalam penelitian ini adalah ketua/wakil ketua dan ketua Tim pemenangan pilgub Jateng 2018 di DPC PDIP Kabupaten Klaten yang saling terkait secara vertikal. Oleh karena itu dalam mencari data atau informasi dari informan, sekaligus dilakukan pengecekan data atau informasi dari informan lain. Misalnya pada waktu wawancara untuk menggali informasi dari ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten, sekaligus pula digunakan untuk mengecek kebenaran informasi dari ketua Tim kampanye pilgub Jateng 2018 di DPC PDIP Kabupaten Klaten secara internal yang bersifat vertikal.

### **3.) Penggunaan Bahan Referensi**

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan hasil rekam audio dan foto. Penggunaan cara ini dapat diperoleh gambaran lengkap mengenai informasi yang diberikan oleh informan sekaligus dapat memahami konteks pembicaraannya, sehingga dapat memperkecil timbulnya kesalahan yang terjadi.

#### **4.) *Member Check***

*Member check* adalah tahap untuk melakukan konfirmasi kepada informan pada setiap akhir wawancara. Hal ini dilakukan dengan maksud apabila ada kekurangan dapat ditambah dengan data atau informasi baru yang relevan.

#### **e. Transferabilitas**

Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam konteks atau situasi tertentu yang berkaitan dengan penggunaan strategi.

#### **f. Dependabilitas**

Dependabilitas dalam hal ini menguji apakah penelitian ini dapat diulangi atau direplikasikan dengan menemukan hasil yang sama. Peneliti perlu memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 80-81

#### **g. Konfirmabilitas**

Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi sosial pada hakekatnya bersifat unik dan tidak terekonstruksi oleh karena itu sangat sulit mengukur konsistensi hasil penelitian, khususnya tentang komunikasi politik yang melibatkan banyak orang yang tergabung di dalam partai maupun di luar partai dengan berbagai peran di dalamnya. Dengan demikian, untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian dilakukan *audit trail*, yakni dengan melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang dilaporkan memang demikian dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Mencatat dan merekam sedetail mungkin hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi sebagai data mentah guna kepentingan analisis selanjutnya.
- 2.) Membuat penafsiran atau kesimpulan sebagai hasil sintesis data.
- 3.) Melaporkan seluruh proses penelitian dari sejak pra observasi dan penyusunan desain sampai pengolahan data, sebagaimana yang digambarkan dalam laporan penelitian ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam menyusun skripsi, peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yaitu:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan, dimana dari bab ini akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi. Secara keseluruhan bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Menjelaskan gambaran umum mengenai profil DPC PDIP Kab. Klaten, visi dan misi, struktur organisasi, hasil pemilihan umum DPC PDIP Kabupaten Klaten.

Bab III: Bab ini memaparkan tentang komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC PDIP Kabupaten Klaten. Di dalamnya meliputi tentang komunikator politik, isi pesan, komunikan politik, saluran/media, efek komunikasi politik dan hambatan serta hasil pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Klaten.

Bab IV: Masuk dalam bagian akhir/penutup, di dalamnya berisi hasil akhir/kesimpulan, saran dari peneliti dan kata penutup.

## **BAB II**

### **PROFIL DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

#### **KABUPATEN KLATEN**

Bab ini berisi tentang profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten yang di dalamnya mencakup sejarah partai, visi-misi, pengurus harian partai dan hasil pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa tengah 2013.

##### **A. Pofil DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disingkat PDIP identik dengan warna merah dengan simbol kepala banteng dan moncong putih di dalamnya. Partai yang mempunyai ideologi Nasionalis yang berasaskan Pancasila dan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 mempunyai 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 410 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang salah satunya berada di Kabupaten Klaten yang bertempat di Jl. Ronggowarsito No. 295 Klaten-Jawa Tengah. Pada periode 2015-2020 di ketuai oleh H. Sunarno SE., MHum yang sebelumnya juga menjabat sebagai bupati terpilih Kabupaten Klaten selama dua periode 2005-2010 dan 2010-2015.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sutarjo, wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten 10 Mei 2018.



Gambar 1.1 Logo PDI perjuangan

## B. Sejarah PDI Perjuangan

Sejarah PDI Perjuangan tidak bisa terlepas dari kebijakan politik pada masa orde lama, pasalnya PDI Perjuangan merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 yang terdiri 5 fusi partai politik diantaranya : Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berdiri pada tanggal 18 November 1945 diketuai oleh Ds Probowinoto, Partai Katolik yang didirikan oleh umat Katolik Jawa pada tahun 1923, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1954, dan Murba yang merupakan gabungan dari Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata, dan Partai

Indonesia Buruh Merdeka yang berdiri pada tanggal 7 November 1948 dipimpin oleh Tan Malaka.<sup>38</sup>

Berdirinya PDI tidaklah berjalan dengan mulus berbagai macam konflik internal, intervensi pemerintah sampai dualisme kepemimpinan menjadikan konflik berkepanjangan dari mulai berdiri pada tahun 1973-1996 konflik tak kunjung selesai. Dualisme kepemimpinan antara kubu Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri terlihat sangat ketara pada pemilihan umum 1997. Kemudian PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi yang didukung oleh Pemerintah memutuskan untuk mengikuti pemilu umum 1997 akan tetapi hasil yang didapat pada waktu itu tidak memuaskan. PDI Soerjadi mengalami kekalahan yang sangat telak disinyalir karena disebabkan oleh banyaknya kader PDI yang lebih memberikan dukungannya kepada Megawati untuk memimpin PDI mereka menyebut dirinya dengan Barisan Pendukung Megawati (BPM) dan Pendukung Setia Ibu Megawati (PSIM) yang bermarkas di Jogja pada waktu itu. Megawati oleh pendukungnya dinilai mampu memimpin dan merubah PDI menjadi lebih baik.<sup>39</sup>

Dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri-pun semakin menguat setelah tumbangya Presiden

---

<sup>38</sup> Yugha, Tim Divaro. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Penerbit Erlangga). hlm. 101-106b

<sup>39</sup> Wawancara dengan Eko Prastyo. Ketua Tim Kemenangan PDIP Kab. Klaten. 10 Agustus 2018

Soeharto dan berakhirnya Era Reformasi 1998. Karena dinilai situasi menguntungkan Megawati memutuskan untuk kembali ke panggung politik dengan mengikuti pemilu 1999. Akan tetapi, pada waktu itu nama PDI sudah terdaftar dalam pemilihan umum 1997 untuk bisa mengikuti pemilu Megawati menambah nama pada Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tanggal 1 February 1999.<sup>40</sup>

PDI Perjuangan melaksanakan kongres pertamanya pada tanggal 27 Maret-01 April 2000. Hasil dari kongres tersebut menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena sejumlah 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan.

Perjalanan politik megawati tergolong sangat lancar pada tahun 2001 Megawati diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid yang di turunkan dalam sidang Istimewa MPR-RI. Ditangan Megawati PDI Perjuangan berhasil menjadi partai yang besar. Pada tahun 2004 setelah masa kepemimpinanya sebagai Presiden RI habis Megawati mencalonkan kembali pada pilpres masa bakti 2004-2009 berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi yang

---

<sup>40</sup> Thaha, Idris. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada) hlm. 211.

mempunyai latar belakang religius akan tetapi kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Dengan basis masa yang banyak dan keyakinan tak kenal menyerah Megawati mencalonkan dirinya kembali sebagai Presiden pada masa bakti 2009-2013 kali ini berpasangan dengan Prabowo Subianto dengan latar belakang TNI sama melawan petahana SBY yang juga mempunyai latar belakang TNI. Hasil akhir menunjukkan Megawati lagi-lagi mengalami kekalahan oleh SBY yang tak lain petahana.

Puncaknya pada pilpres masa bakti 2013-2018 Megawati menyerahkan estafet kepresidenannya kepada kader partai terbaiknya Jokowi Dodo berpasangan dengan Jusuf Kalla dan melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasil akhir dari pilpres membawa Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dalam pilpres.

Pencapaian yang luar biasa dari PDI Perjuangan yang mampu menguasai berbagai kursi yang strategis dari tahun ke tahun disemua wilayah pemerintahan hingga saat ini.

### **C. Visi dan Misi PDI Perjuangan**

Visi :

Visi Partai adalah suatu keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan menjadi arah perjuangan partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar PDI Perjuangan adalah :

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1994.
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi :

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, dekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagai mana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai.

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum :

- a. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat dibidang politik, berdiri diatas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkebhinekaan dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus :

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan.

- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat UUD 1946 yaitu mewujudkan pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama Internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi :

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik.
- c. Membentuk kader yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintah negara.
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945, serta jalan TRI SAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai.
- e. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
- f. Mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.

- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.<sup>41</sup>

#### **D. Struktur Pengurus DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Klaten**

Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Klaten Masa Bakti 2015-2020 sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1. Ketua : Sunarno. SE., M.HUM
- 2. Sekretaris : Agus Riyanto
- 3. Wakil Sekretaris Bidang Internal : Arry Shinta Wati
- 4. Wakil Sekretaris Bid. Eksternal : Subarjo
- 5. Wakil Bendahara : Mulyatminah
- 6. Wakil Ketua Bid. Kehormatan Partai : Sutarjo
- 7. Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Ideologi : Aris Prabowo

---

<sup>41</sup> <https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/27/Partai/Visi-dan-Misi>.  
Diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

<sup>42</sup> Data Administrasi PDIP Kabupaten Klaten Tahun 2018.

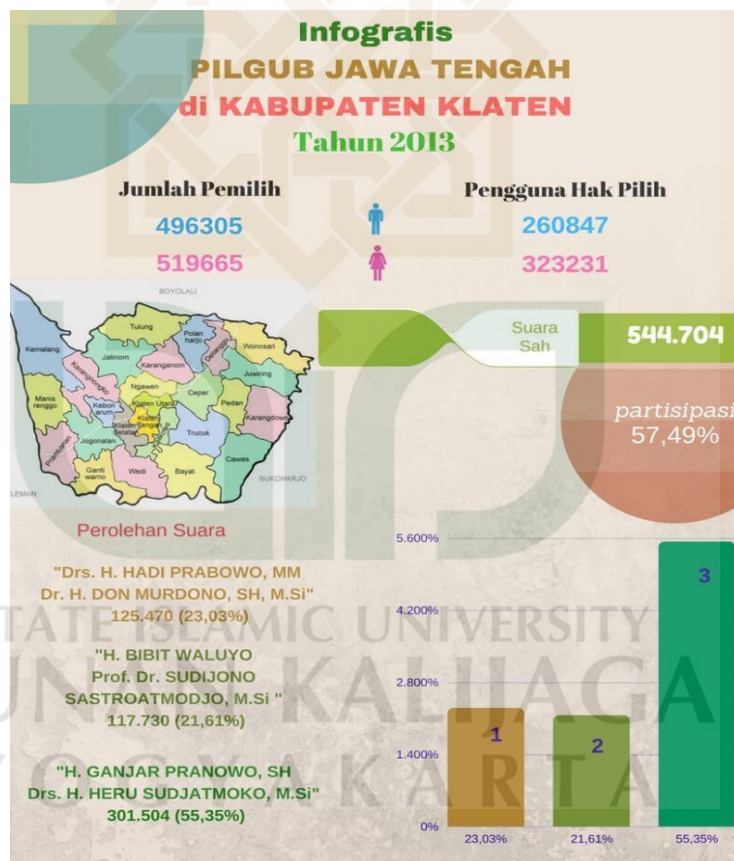
- |                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 8. Wakil Ketua Bid. Organisasi               | : Agus Wibowo       |
| 9. Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu        | : Hartono           |
| 10. Wakil Ketua Bid. Komunikasi Politik      | : Star Joko Riyanto |
| 11. Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Ideologi | : Danang Sindu, SH  |
| 12. Wakil Ketua Bid. Maritim                 | : Hartanto          |
| 13. Wakil Pemberdayaan Manusia               | : Hj. Sri Mulyani   |
| 14. Wakil Ketua Bid. Ekonomi                 | : Sri Lestari       |
| 15. Wakil Ketua Bid. Buruh Tani dan Nelayan  | : Supriyanto        |
| 16. Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Ideologi | : Hartanti          |
| 17. Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Seni Budaya  | : Andi P            |
| 18. Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Ideologi | : Marwanti          |

#### **E. Hasil Pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Klaten**

Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah pada periode 2013-2018 di ikuti oleh 3 calon yaitu yang pertama Hadi Prabowo dengan wakil Don Murdono yang di usung oleh partai (PKS, Gerindra, PKB). Kedua Bibit Waluyo dengan Sudijono sastroatmodjo diusung oleh (Partai Demokrat, Partai Golkar dan PAN) dan yang ketiga Ganjar Pranowo dengan Heru Sujatmoko diusung oleh partainya sendiri (PDIP).

Ganjar Pranowo dengan Heru Sujatmoko berhasil meraih suara tertinggi sejawa tengah mengalahkan kedua pesaingnya dengan total perolehan sebanyak 9.962.417 suara. Ganjar-Heru hanya kalah di 6

kabupaten/kota dengan total 35 kabupaten/kota yang mengikuti pilgub di Jawa Tengah. Itu artinya Ganjar menang di 29 Kabupaten/kota salah satunya di Kabupaten Klaten, Ganjar-Heru berhasil mengumpulkan suara sebanyak 301.504 suara. Menang 50% lebih dari jumlah total semua pemilih yang ada di Kabupaten Klaten.



Gambar 1.2 info grafis pilgub Jateng di kabupaten Klaten

### **BAB III**

#### **PENERAPAN KOMUNIKASI POLITIK DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KLATEN DALAM PILGUB JAWA TENGAH**

Masuk ke bab tiga berisi tentang komunikator politik, isi pesan, komunikasi politik, saluran politik dan hambatan yang dialami PDIP Kabupaten Klaten serta hasil pemilihan Gubernur 2018 di Kabupaten Klaten.

##### **A. Komunikator Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten**

Keberadaan komunikator dalam sebuah proses komunikasi politik merupakan salah satu hal yang sangat vital adanya, efektif tidaknya suatu pesan yang disampaikan tergantung oleh komunikator yang menyampaikan. Penyampaian pesan politik dapat dilakukan dalam berbagai macam cara seperti menggunakan retorika, agitasi politik, propaganda, publik relasi, dialog, loby politik dan bisa juga melalui saluran/alat bantu untuk menyampaikan pesan menggunakan berbagai media massa.

Dalam hal komunikator politik PDIP Kabupaten Klaten menempatkan semua kadernya sebagai komunikator politik baik kader yang menjabat di dalam atau di luar pemerintahan. Hal lain yang dilakukan PDIP ialah dengan menggandeng kader ditingkat paling bawah yaitu anak ranting sampai kader ditingkatan paling atas kader nasional.

Seperti yang telah disampaikan oleh Sutarjo wakil ketua PDIP Kabupaten Klaten sebagai berikut :

*"Komunikator atau penyampai pesan ya. Kami, semua kader PDIP adalah komunikator politik, mulai dari kader ditingkat nasional sampai anak ranting sekalipun, baik yang mempunyai jabatan di pemerintahan maupun tidak semua adalah komunikator politik."*<sup>43</sup>

Sepakat dengan apa yang disampaikan wakil ketua PDIP Kabupaten Klaten Sutarjo, Eko Prasetyo ketua tim kemenangan PDIP Kabupaten Klaten untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimun menambah dalam argumennya.

*"Kami yang berada di daerah dibantu teman-teman yang ada ditingkat nasional, mereka turun gunung untuk membantu kami yang ada di daerah seperti Prananda Prabowo, Cahyo Kumolo, Puan Maharani, Hamka Hak dan masih banyak lagi teman-teman yang ikut sebagai komunikator politik".*<sup>44</sup>

Selain kader ditingkat nasional yang turun langsung membantu sebagai komunikator politik, PDIP Kabupaten Klaten juga memaksimalkan kader partai yang tergabung dalam struktur partai mulai dari pengurus

---

<sup>43</sup> Wawancara Sutarjo, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Klaten tanggal 1 Agustus 2018.

<sup>44</sup> Wawancara Eko Prasetyo, Ketua Tim Kemenangan PDIP Kabupaten Klaten tanggal 19 Agustus 2018.

DPC sampai pengurus anak ranting untuk menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik dengan tujuan utamanya untuk memaksimalkan perolehan surat suara.

Ketua tim kemenangan PDIP Kabupaten Klaten Eko Prasetyo menjelaskan bahwa secara struktural ada 15.141 kader yang siap memenangkan sekaligus menjadi komunikator politik PDIP Kabupaten Klaten dalam kemenangan calon Gubernur Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimun.

*"Kami mempunyai pengurus di DPC sebanyak 18 Orang, PAC 26 kecamatan x 11 orang = 286 orang ditambah pengurus ranting 401 desa x 9 orang = 3.609 orang, tambah lagi 2.807 anak ranting x 3 orang = 8.421 orang dan satgas ada 7 orang x 401 desa = 2.807 orang. Jadi total ada 15.141 orang itu hanya di dalam struktural saja".<sup>45</sup>*

Sebanyak 15.141 pengurus yang terbagai dalam 18 pengurus di kabupaten, 11 pengurus disetiap kecamatan, 9 pengurus setiap Desa, 3 pengurus ditingkat anak ranting dan ditambah 7 satgas disetiap Desa, PDIP Kabupaten Klaten mencoba memaksimalkan sumber daya manusia yang mereka miliki disetiap wilayah kepengurusannya masing-masing dan ditambah dengan bantuan kader partai yang tidak masuk dalam struktur

---

<sup>45</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

kepengurusan partai atau simpatisan partai yang siap menjadi mesin partai diberbagai bidang /wilayah.

Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai komunikator politik kader PDIP Kabupaten Klaten mempunyai metode untuk mendekati komunikan politik dengan cara melakukan pendekatan secara struktural dan sosial-kultur, secara struktural kader partai yang menduduki jabatan penting dipartai akan mendekati pula pimpinan organisasi/lembaga yang dijadikan sebagai komunikan politik untuk melakukan lobi-lobi politik dan selebihnya akan dilakukan melalui gerakan sosial-kultur bertatap muka dan berdialog langsung dengan masyarakat. Seperti yang dicontohkan oleh Sutarjo :

*"Kader PDIP tingkat pemikirannya harus lebih unggul minimal ya sama dengan tingkatan lembaga/organisasi yang di luar sana, contohnya kalau setingkat ketua ranting ya pemikirannya harus sama seperti kepala Desa, ketua anak cabang ya Camat, ketua DPC ya sekelas Bupati. Nah, untuk kader biasa kami maksimalkan sesuai dengan latar belakang kader, karena kader PDIP Kabupaten Klaten ini terdiri dari berbagai latar belakang mulai dari buruh, pengusaha, aktivis, mahasiswa, petani ada juga yang background dari ormas*

*sosial dan keagamaan. Semua ada disini, nantinya tugas mereka sesuai sektor masing-masing”.<sup>46</sup>*

Tak hanya bergerak disektor umum PDIP kabupaten Klaten juga memaksimalkan organisasi gerakan sayapnya yang bernama Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) gerakan ini sebagai wadah kegiatan keagamaan serta menjalin silaturahmi antar sesama kader yang beragama Islam sekaligus sebagai komunikator PDIP kepada masyarakat bahwa PDI tidak anti dengan Islam.

*“Melalui BAMUSI ini kami mengadakan pengajian rutin yang diadakan keliling disetiap Pengurus Anak Cabang (PAC). Disamping mempererat soliditas antar kader kegiatan ini juga berfungsi sebagai ajang silaturahmi kepada warga sekitar dan menepis kabar tak sedap yang ditunjukkan kepada PDIP seperti PDIP anti Islam”.<sup>47</sup>*

Menurut Eko Prastyo adanya Taj Yasin Maimon sebagai calon wakil gubernur membuat PDIP kabupaten Klaten memperkuat diri untuk meraih suara pemilih muslim di kabupaten Klaten bukan lewat partainya PPP tetapi melalui ke NU-anya. Karena NU merupakan salah satu ormas Islam terbesar di kabupaten Klaten bahkan se-Indonesia dan mempunyai basis masa yang banyak yang mudah ditemui dikalangan santri pondok

---

<sup>46</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

<sup>47</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

pesantren ditambah wakil Gubernur Taj Yasin Maimun juga merupakan putra dari Kiai mashur di Nusantara KH Maimun Zubair yang tidak asing dikalangan ormas Nahdlatul Ulama.

PDIP kabupaten Klaten menyadari betul bahwa harus ada sinergisitas antara nasionalis dan religius berkaca dari pemilihan tahun lalu yang dilaksanakan di DKI Jakarta sangatlah berdampak sekali kepada kader PDIP yang ada di daerah.

*“Dampak yang dihasilkan pada pilgub DKI pada tahun lalu menjadikan beban moral bagi kami kader PDIP yang ada di daerah-daerah, kami tidak ingin hal serupa terjadi disini. Maka dari itu kami mengantisipasi dengan mengambil calon wakil gubernur dari partai Islam dan kami juga selalu membangun hubungan baik kepada ormas-ormas Islam dan pondok pesantren yang ada di Klaten baik dengan lembaga maupun dengan orang-orang yang ada di dalamnya”.<sup>48</sup>*

Kedekatan Pengurus PDIP Kabupaten Klaten dengan tokoh agama di Klaten juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada komunikan menjelang pemilihan Gubernur 2018. Tokoh yang menyampaikan suatu pesan kepada umatnya menurut Eko Prasetyo merupakan salah satu cara untuk mendulang massa.

---

<sup>48</sup> Wawancara Eko Prasetyo tanggal 19 Agustus 2018.

*"Kami dekat dengan ustadz/ulama dari NU atau Muhammadiyah, bahkan sekarang ini tidak sedikit yang maju menjadi calon anggota legislatif melalui PDIP, jadi lewat ketokohan mereka bisa dijadikan sebagai komunikator politik juga".<sup>49</sup>*



**Foto 1.2 Ganjar dan Tim sowan ke Pondok Pesantren Darussalam**

Berdasarkan uraian diatas PDIP Kabupaten Klaten menempatkan dan memaksimalkan seluruh *stake holder* yang ada dibarisan PDIP mulai dari kader partai, pengurus partai, organisasi partai (BAMUSI) dan simpatisan partai untuk meraih surat suara, melalui pendekatan secara

---

<sup>49</sup> Wawancara Eko Prasetyo tanggal 19 Agustus 2018.

struktur dan sosial-kultur dengan pergerakan yang dilakukan secara personal maupun kolektif diharapkan dapat menambah perolehan jumlah surat suara yang didapat.

Sejalan dengan apa yang dikategorikan oleh Nimmo dalam komunikator politik bahwa ada tiga jenis komunikator politik yang pertama, politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Hal ini bisa ditemui melalui uraian diatas yang mana PDIP Kabupaten Klaten menggunakan seluruh kadernya untuk terlibat dalam komunikasi politik untuk menjadi komunikator politik, baik kader yang sedang menduduki kursi di pemerintahan maupun tidak. Kedua, Profesional sebagai komunikator politik. PDIP Kabupaten Klaten kurang memanfaatkan kondisi tersebut secara maksimal dilihat dari data data yang telah digali oleh peneliti minim informasi dan data yang didapatkan. Ketiga, Aktivis sebagai komunikator politik. Untuk dapat meraih suara pemilih muslim dalam hal ini PDIP Kabupaten Klaten mendompleng nama besar para tokoh agama khususnya ulama terkenal KH Maimun Zubair lewat jaringan ulama dan para santri.

Menurut peneliti langkah yang diambil oleh PDIP Kabupaten Klaten dalam menjadikan semua kadernya sebagai komunikator politik sesuai dengan sektor/bidang masing-masing merupakan hal yang wajar karena pemilu merupakan agenda partai dan kader adalah mesin partai. Hal yang menjadi pembeda ialah sosok KH Maimun Zubair, kehadiran KH Maimum

secara tidak langsung memudahkan PDIP Kabupaten Klaten dalam meraih suara pemilih muslim khususnya di kalangan warga NU. Walaupun pesaing dalam pilgub Ida Fauziah yang juga merupakan kader NU sekaligus juga kader PKB akan tetapi PDIP Kabupaten Klaten yakin lewat nama besar KH Maimun Zubair dapat meraih suara tinggi di kalangan warga NU.

Peneliti menemukan bahwa adanya kekurangan yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Klaten dalam melakukan pendekatan atau menggandeng para profesional sebagai komunikator politiknya. Hal tersebut apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh PDIP Kabupaten Klaten tentunya dapat menambah perolehan surat suara karena peran dari para profesional ini sangat besar dalam membentuk opini publik selain politikus dan aktivis yang dimiliki PDIP Kabupaten Klaten.

#### **B. Pesan Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten**

Pesan politik merupakan suatu informasi, ajakan, imbauan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan ini dapat berbentuk simbol, suara, lambang, gambar maupun bahasa. Penggunaan pesan politik disesuaikan dengan komunikan dan saluran yang digunakan. Efek dari pesan yang disampaikan dapat menyimpulkan pengaruh atau timbal balik bagi komunikan kepada komunikator.

Pesan politik yang disampaikan oleh PDIP dilakukan dengan berbagai macam cara seperti bertatap muka secara langsung, berdialog, orasi politik, diskusi, pengajian dan menggunakan saluran sebagai alat bantu seperti kaos, spanduk, baliho dan stiker. Pesan politik disampaikan secara verbal maupun nonverbal atau bisa juga menggunakan saluran/alat politik. Pesan politik yang disampaikan berisi berupa ajakan, gagasan, kebijakan, imbauan dan informasi yang akan disampaikan kepada komunikan yang mempunyai tujuan untuk mencapai pemaknaan bersama atau mempunyai persepsi yang sama. Lewat dialog, pengajian dan pertemuan PDIP Kabupaten Klaten mencoba membuka ruang seluas luasnya kepada masyarakat agar tercipta kedekatan antar keduanya (komunikator-komunikan) yang nantinya akan mempermudah penyampaian pesan politik.

Sebelum menyampaikan pesan politiknya PDIP Kabupaten Klaten terlebih dahulu melihat kepentingan dan kebutuhan dari komunikan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam komunikasi dan antusias dan timbal balik dari masyarakat yang besar. Sebab, setiap masyarakat pasti mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dengan begitu pesan yang disampaikan diharapkan pesan yang diterima akan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Eko Prasetyo:

*"Pesan yang kami bawa sifatnya universal diperuntukan semua masyarakat seperti pemaparan visi-misi. Ada juga pesan yang sifatnya khusus yang diperuntukan untuk komunitas/kelompok tertentu sesuai dengan kepentingannya, misal sasaran kita umat islam ya kita harus membawa program-program yang dapat menguntungkan umat Islam lewat pengajian atau sowan ke pondok pesantren".<sup>50</sup>*

Sepakat dengan pernyataan Eko Prasetyo, Sutarjo menambahkan dalam argumennya:

*"Secara umum kami selalu membawa gagasan dari calon yang kami angkat (Ganjar-Yasin) sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan juga kami memberikan informasi, edukasi seputar pemilu kepada masyarakat umum untuk tidak golput dan selalu berhati-hati dalam menerima pesan".<sup>51</sup>*

Pesan politik yang disampaikan oleh kader PDIP kepada komunikan bisa dikategorikan menjadi dua macam yaitu pesan umum dan pesan khusus. Secara umum pesan politik berisi tentang visi misi dan program kerja calon Gubernur ditambah dengan prestasi yang sudah

---

<sup>50</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>51</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

dicapai oleh petahana pada saat menjabat serta mengajak masyarakat agar menggunakan hak suaranya dalam pemilu agar tidak golput dan selalu berhati-hati pada saat menerima pesan/informasi yang ada. Sedangkan pesan politik yang disampaikan secara khusus kepada suatu kelompok/umat Islam PDIP Kabupaten Klaten lebih mengedepankan program-program untuk kebutuhan umat Islam khususnya dikalanga pondok pesantren salah satunya dengan mengalokasikan dana sebesar 331 Miliar untuk guru Madrasah dan Pondok Pesantren.<sup>52</sup>

Mengutip dari teori komunikasi politik oleh Dan Nimmo yang menyatakan bahwa pesan politik merupakan informasi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan yang nantinya dapat saling mempengaruhi pandangan satu sama lain atau dapat juga melalui tindakan timbal balik.<sup>53</sup> Menurut peneliti PDIP Kabupaten Klaten pada saat melakukan penyampaian pesan politiknya telah melakukan pemetaan masalah/isi pesan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan komunikan. Hal ini menurut peneliti merupakan suatu tindakan yang benar dan tepat karena dapat menimbulkan suatu komunikasi yang efektif, saling memberi dan menerima pesan, *feedback* yang dihasilkan dari pesan tersebutpun akan lebih besar karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikan dan nantinya juga bisa

---

<sup>52</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/30/ganjar-yasin-alokasikan-pr-331-m-untuk-guru-madin-dan-pesantren>.

<sup>53</sup> *Ibid. hlm.125.*

menambah antusias dari komunikan terkait pesan-pesan yang disampaikan oleh PDIP Kabupaten Klaten.

### **C. Komunikan Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten**

Komunikan politik merupakan penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam hal ini kader PDIP sebagai komunikator dan calon pemilih/masyarakat sebagai komunikannya. Dalam penyampaian pesan politiknya PDIP Kabupaten Klaten telah memetakan segmen dan target komunikan berdasarkan latar belakang atau melalui pengolongan sosial. Pengolongan sosial tersebut dapat berdasarkan demografi, geografis, agama, profesi, kelas sosial dan tingkat pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar mempermudah jalanya komunikasi antara komunikator dengan komunikan agar nantinya pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima sesuai dengan harapan dan kemampuan komunikan.

*"Tentunya berbeda penyampaian pesan yang kami lakukan pada masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang tinggal di desa, masyarakat dengan pendidikan tinggi dengan masyarakat yang kurang akan pendidikan, kelompok satu dengan kelompok yang lain, pemilih pemula dengan pemilih lama".<sup>54</sup>*

---

<sup>54</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

Untuk segmentasi pemilih muslim PDIP Kabupaten Klaten menyadari betul keberagaman komunitas yang ada di wilayahnya.

*"Di kabupaten Klaten banyak sekali organisasi di masyarakat yang berlatar belakang Islam diantaranya ada Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, MTA, FPI, FUI dsb. Dari nama-nama diatas sebagian ada yang berafiliasi dengan partai politik ada juga yang murni organisasi Islam. Meskipun begitu PDIP Kabupaten Klaten selalu melakukan pendekatan dan menjalin hubungan baik kepada semua ormas Islam walaupun konskuensinya ditolak sekalipun".<sup>55</sup>*

Berbeda dengan Eko Prasetyo, Sutarjo cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pendekatan dengan ormas Islam berdasarkan peta yang telah disusun.

*"Kami mendekati yang pasti-pasti saja, kita semua tahu bahwa Muhammadiyah dekat dengan PAN, NU dengan PKB nya dan PKS dengan jaringannya".<sup>56</sup>*

Eko Prasetyo pada saat diwawancara selalu menekankan bahwa PDIP Kabupaten Klaten sama sekali tidak anti Islam, mereka meyakinkan kepada masyarakat khususnya umat Islam bahwa petahana Ganjar Pranowo sudah terbukti bekerja secara konkrit dengan modal hasil dari

---

<sup>55</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>56</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

kerja-kerja selama menjabat sebagai gubernur periode sebelumnya dan ditambah dengan bergabungnya Taj Yasin Maimun yang secara keislaman tidak perlu diragukan dan ditambah dengan pengalamannya yang pernah duduk dikursi pemerintahan sebagai anggota DPRD di Jawa Tengah dari Fraksi PPP (partai Islam).

Dari hasil wawancara, peneliti mengelompokkan beberapa karakteristik pemilih/komunikan yang disasar oleh PDIP Kabupaten Klaten yang pertama :

#### 1. Pemilih Tradisional

Pemilih ini lebih mengedepankan kedekatan sosial-budaya, agama, asal-usul, lingkungan sekitar. Loyalitas yang tinggi merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki, pemilih ini mudah ditemui lewat keluarga, kerabat dan orang-orang terdekat/kader partai. Pemilih ini mudah dijumpai pada kalangan pondok pesantren yang mempunyai seorang kiai sebagai penentu pilihan/ketua organisasi masyarakat yang mempunyai banyak pengikut/massa.

#### 2. Pemilih Rasional

Pemilih ini lebih mengedepankan gagasan dan pikiran, selalu menggunakan pertimbangan pada saat pementuan pilihan yang tepat, tak mudah termakan janji politikus/kader partai dan selalu berhati hati dalam menerima segala macam informasi. Pemilih ini

mudah ditemui pada aktivis, wartawan, mahasiswa, akademisi dan masyarakat berpendidikan yang melek akan politik.

### 3. Pemilih Pemula

Pemilih ini bisa ditemui pada anak-anak yang baru mendapat hak pilihnya. Karena lahir di era digital yang mana segala informasi dapat dengan mudah diperoleh. pemilih ini umumnya lebih melek akan teknologi, keterbukaan akan akses internet dan majunya teknologi mempermudah dalam mencari segala informasi yang ada.

Dari ketiga pemilih diatas PDIP Kabupaten Klaten mempunyai formulasi untuk mendapatkan suara pemilih dengan melakukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter setiap komunikan dengan pendekatan yang dipakai berupa pendekatan sosiologis, psikologis dan struktur sesuai dengan kebutuhan komunikator untuk mendekati komunikannya. Kondisi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh McQuil dan Windahl yang menjelaskan bahwa khayak atau komunikan merupakan sejumlah orang yang pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye sehingga dibutuhkan berbeda-beda karakteristiknya, hal ini bertujuan supaya terjadi efektifitas pada saat penyampaian pesan.

#### **D. Efek Komunikasi Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten**

Sebuah komunikasi bisa dikatakan efektif apabila komunikasi tersebut dapat menimbulkan suatu efek seperti yang diharapkan. PDIP Kabupaten Klaten melalui Eko Prasetyo berharap pesan yang disampaikan melalui kadernya dapat diterima dan menimbulkan efek positif di masyarakat. Efek yg diharapkan diantaranya yaitu :

##### **1. Edukasi Politik**

Demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa berbicara politik itu hal yang tabu, dunia politik itu kotor, politik tidak bisa merubah tatanan hidup di masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat semakin merosot terhadap politik. Berawal dari kegelisahan ini PDIP Kabupaten Klaten mencoba menjelaskan bahwa politikus yang terpilih lewat pemilu nantinya secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah disusun maupun aspirasi dari masyarakat secara langsung dengan begitu diharapkan berpartisipasi masyarakat dalam dunia politik dapat meningkat sebagai *supporting sytem* maupun pengawal kebijakan pemerintah.

##### **2. Partisipasi politik**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi. Setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih mempunyai hak pilih untuk menemtukan calon pemimpin negeri ini lewat

pemilu. Oleh karena itu diharapkan partisipasi dari masyarakat dalam pemilu, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam politik bisa dengan cara melekat politik, keuntungan melekat politik masyarakat bisa mengetahui tatanan politik, kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh kepada masyarakat secara luas. Untuk berpartisipasi dalam politik tidak harus menjadi politikus/kader partai terlibat dalam pemilu dengan tidak golput sudah termasuk berpartisipasi dalam politik.

### 3. Menambah dukungan/perolehan suara

Intisari dari komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Klaten ialah untuk menaikkan elektabilitas partai dan calon yang diusung dengan tujuan akhirnya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat baik dukungan berupa surat suara maupun kebijakan-kebijakan yang telah dan yang akan dilakukan.<sup>57</sup>

### **E. Saluran Politik DPC PDIP Kabupaten Klaten**

Saluran komunikasi politik merupakan penghubung antara komunikator dan komunikan. PDIP Kabupaten Klaten tentunya sama dengan partai lain, menggunakan saluran politik sebagai alat serta sarana untuk mempermudah penyampaian pesan/kampanye. Saluran ini lazim digunakan oleh para politikus dan partai politik di Indonesia. Bentuk dari

---

<sup>57</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

saluran politik bermacam macam mulai dari lisan, tindakan, gambar, audio visual maupaun kombinasi dari semuanya. Adapun contoh saluran yang dipakai oleh PDIP Kabupaten Klaten, diantaranya melalui :

#### 1.) Ulama/Tokoh Masyarakat

Kedekatan dengan tokoh agama yang disegani oleh organisasi massa sangat dimanfaatkan oleh PDIP menjelang pemilihan gubernur 2018. Kehadiran seorang tokoh untuk menyampaikan pesan politik merupakan suatu cara yang efektif untuk meraih suara pemilih khususnya dari kalangan orang tua, PDIP Kabupaten Klaten melakukan komunikasi politik dengan cara melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan para ulama setempat. Seperti yang disamapikan oleh Sutarjo :

*"kami melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh agama, organisasi masyarakat dan sowan ke pondok pesantren yang ada di sekitar Klaten."<sup>58</sup>*

#### 2.) Bupati dan Anggota Legislatif

PDIP Kabupaten Klaten juga memanfaatkan kader partai khususnya yang berada dikursi pemerintahan sebagai saluran kampanye lewat jaringan massa yang mereka miliki. Tentunya hal ini sangat mudah dan tidak memakan biaya begitu banyak untuk mensosialisasikan calon yang diusung.

---

<sup>58</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

*“saya dan teman-teman yang ada di DPR selalu siap menjalankan apa yang menjadi hajat partai dan kebetulah juga Bupati Klaten sekarang ini adalah kader PDIP jadi dapat memudahkan kami dalam meraih surat suara.”<sup>59</sup>*

### 3.) Media Massa

Sutarjo mengatakan bahwa saluran lain yang digunakan PDIP ialah berupa media massa :

*“Seperti pada umumnya kami menggunakan alat peraga kampanye seperti Baliho, sepanduk, stiker dan perangkat lainnya sebagai media komunikasi”<sup>60</sup>*

Pada saat ditanya mengenai media elektronik Sutarjo menambahkan:

*“Kalau penggunaan media sosial iya, tapi untuk penggunaan media elektronik kami belum 100% menggunakannya, karena saat ini ada aturan dari KPU mengenai jadwal kampanye di media elektronik (tv dan radio).”<sup>61</sup>*

PDIP Kabupaten Klaten merasa lebih nyaman dengan menggunakan metode konvensional dalam meyakinkan masyarakat. Untuk saat ini PDIP Kabupaten Klaten lebih berfokus dengan metode

---

<sup>59</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>60</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

<sup>61</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

*face to face* untuk meningkatkan elektabilitas pasangan yang mereka usung.

*“Melalui forum dialog, kajian Bamusi, sarasehan antar komunitas/kelompok kami dijadikan sebagai sarana untuk berbaur, melebur dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat”.<sup>62</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menyimpulkan terdapat tiga jenis saluran politik yang digunakan oleh PDIP kabupaten Klaten diantaranya :

a. Komunikasi Massa

Penggunaan yang mudah dengan jangkauan yang luas dan bersifat heterogen menjadikan komunikasi massa ini sangat diminati. Terdapat dua bentuk komunikasi masa yang di lakukann PDIP Kabupaten Klaten, diantaranya yaitu :

1.) Komunikasi tatap muka

Komunikasi ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan komunikan bisa melalui dialog, orasi politik, diskusi maupun pertemuan.

2.) Komunikasi dengan perantara

---

<sup>62</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.

Seperti dengan namanya komunikasi ini menggunakan alat sebagai perantara untuk menghubungkan suatu pesan dari komunikator dengan komunikan. Alat/perantara ini berupa media masa seperti media elektronik (tv, radio), media cetak (koran, baliho, stiker) dan media sosial (whatapp, facebook, instagram dsb). PDIP Kabupaten Klaten dalam pemilu kali ini tidak dapat berbuat banyak mengenai kampanye lewat media massa (cetak, elektronik). Pasalnya saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#### b. Komunikasi Interpersonal

Karena komunikasi ini bersifat terbatas PDIP Kabupaten Klaten memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kader partai untuk menyampaikan pesan politik secara *person to person* dengan menjual citra dirinya atau orang lain dimulai dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, kerabat hingga orang yang tak dikenal sekalipun baik dilakukan secara verbal maupaun non verbal. PDIP Kabupaten Klaten memanfaatkan kader partainya yang juga aktif diberbagai organisasi yang mereka ikuti dengan melakukan komunikasi interpersonal.

#### c. Komunikasi Organisasi

Dalam komunikasi organisasi terdapat gabungan dari sifat-sifat saluran komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. PDIP Kabuapten Klaten membuat suatu forum diskusi dengan berbagai lintas organisasi seperti dengan lembaga pondok pesantren, organisasi

masyarakat dengan tujuan guna menciptakan suatu tujuan dan kesepakatan bersama.

Menurut peneliti faktor ketokohan yang diangkat PDIP memiliki andil yang cukup besar untuk mengangkat elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur selain kapasitas seorang tokoh juga mempunyai popularitas sehingga mudah untuk mendapatkan massa. Selain faktor ketokohan penggunaan media sebagai alat bantu kampanye juga sangat penting, sifatnya yang heterogen dan mudah dijangkau siapapun dimanapun merupakan senjata yang ampuh untuk menaikkan elektabilitas dan meraih surat suara. Sayangnya, penggunaan media sosial kurang begitu diperhatikan dan dimanfaatkan secara maksimal.

## **F. Hambatan dan Hasil Pemilihan Gubernur di Kabupaten Klaten 2018**

### **1. Hambatan**

Hambatan dalam melaksanakan kampanye politik nyaris dialami oleh semua partai politik yang mengikuti pemilu. Hambatan bisa datang dari mana saja asalnya faktor teknis maupun non teknis yang datang dari internal atau eksternal partai turut mempengaruhi dalam jalannya komunikasi politik partai. Begitu pula yang dialami oleh PDIP kabupaten Klaten beberapa faktor yang di dapat dari hasil wawancara dengan Eko Prasetyo menurutnya :

*“Ada beberapa hambatan yang dialami PDIP pada saat kampanye berlangsung. Tingkat partisipasi masyarakat yang kurang terhadap pemilu, Citra negatif PDIP yang kerap dikaitkan dengan partainya preman, dan yang paling sering ialah Black Campaign.”<sup>63</sup>*

PDIP Kabupaten Klaten dalam menyikapi persoalan yang terjadi dengan cara melakukan pendekatan dan berkomunikasi secara masif serta melalui gerakan terjun langsung ke masyarakat atau dengan menjemput bola, hal tersebut dimaksudkan untuk mesosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pemilu demi masa depan bangsa sekaligus mengkampanyekan calon politikus yang mereka usung.

Selain kurangnya partisipasi dari masyarakat hambatan lain yang dialami ialah citra negatif PDIP dimasyarakat yang kerap dikaitkan dengan partainya gentho/preman. Citra negatif ini sudah melekat dimasyarakat sejak sebelum era kepemimpinan Megawati di PDIP.<sup>64</sup> Seiring berjalannya waktu PDIP mendewasakan diri dengan cara merubah citra negatif yang selama ini melekat untuk dihilangkan dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, membuka ruang seluas-luasnya dengan masyarakat bagi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang PDIP dan selalu berjalan dengan masyarakat dengan cara setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PDIP selalu mengedepankan kepentingan rakyat.

---

<sup>63</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>64</sup> Wawancara Eko Prasetyo, tanggal 19 Agustus 2018.

*Black campaign* atau kampanye hitam juga menjadi hambatan yang kerap dialami oleh PDIP dalam masa kampanye, ujaran kebencian dan hoax kerep kali diterima oleh PDIP. Menurut Sutarjo hal semacam ini sudah seperti menjadi agenda yang diterima PDIP setiap kali ada pemilu.

*"Kami sudah finish dengan black campaign, setiap akan ada pemilu pasti kami diserang oleh isu isu yang polanya selalu sama PDIP anti Islam, PDIP partainya orang PKI."*<sup>65</sup>

Dalam penanggulangan hoax PDIP Kabupaten Klaten mempunyai unit satuan tugas cyber army PDIP yang mempunyai fungsi untuk memotong berita berita yang tidak benar adanya yang tersebar melalui semua media. PDIP merasa perlu dan segera meninandak semua jenis *black campaign* yang ada, karena selain merupakan tindak kriminal kegiatan itu juga dapat meresahkan masyarakat dan bisa berimbas ke pada citra PDIP.

Hambatan lain yang diterima PDIP tak hanya terkait masalah partai, calon Gubernur yang mereka usungpun tak luput dari dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dalam skandal kasus dana korupsi E-KTP, hal tersebut membuat PDIP harus menyamakan persepsi dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kader terbaiknya tidak terlibat dalam kasus korupsi. Tak mudah memang bagi kader PDIP Kabupten Klaten untuk

---

<sup>65</sup> Wawancara Sutarjo, tanggal 1 Agustus 2018.



Pada pemilihan Gubernur 2018 di Kabupaten Klaten pasangan Ganjar-Yasin mendapat suara sebanyak 397.715 berbeda 96.211 surat suara dibanding dengan pilgub tahun 2013 sejumlah 301.504 surat suara. Walaupun tergolong sukses menghantarkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimun ke kursi Jawa Tengah 1. Namun, perlawanan dari penantang tidak boleh dianggap sebelah mata sebagai pendatang baru Sudirman Said dan wakilnya Ida Fauziah mampu meraih suara sebanyak 254.348 atau 40% dari seluruh jumlah pemilih. Hal tersebut membuat target suara sebesar 75% yang direncanakan oleh PDIP Kabupaten Klaten tidak mampu tercapai.

Keberhasilan pasangan Sudirman-Ida mempersempit kemenangan Ganjar-Yasin di kandang banteng cukup mengejutkan. Sebab, selain Ganjar seorang petahana dirinya juga diusung oleh beberapa partai yang juga menguasai kursi di DPRD Provinsi diantaranya ada Golkar dengan 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PPP 8 kursi dan PDIP sendiri 3 kursi dan juga ditambah 19 kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang di pegang oleh PDIP.

Ada beberapa catatan dari peneliti terkait beberapa hal yang menjadi kelemahan PDIP Kabupaten Klaten sehingga komunikasi politik yang di jalankan kurang maksimal yang menyebabkan perolehan surat suara yang diraih tidak sesuai dengan target. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

a. Minimnya Publikasi

PDIP Kabupaten Klaten dalam mensosialisasikan calon yang mereka usung di media sosial sangatlah minim. Padahal penggunaan media sosial secara maksimal dapat berpengaruh sangat besar sebagai pendekatan partai kepada pemilih khususnya pemilih pemula. Berdasarkan *release* KPU Kabupaten Klaten pemilih pemula yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 19.179 pemilih. Kecenderungan pemilih pemula saat ini serba teknologi dan instan jadi tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan internet atau media sosial tak hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi tetapi juga menggali berbagai informasi.

b. Pendekatan yang tidak merata

Minimnya pendekatan tokoh PDIP Kabupaten Klaten kepada tokoh-tokoh masyarakat kurang merata. Anggota partai dinilai kurang mempunyai power kepada tokoh masyarakat yang nantinya dapat bermanuver sewaktu-waktu. Padahal tokoh masyarakat merupakan potensi dalam mempengaruhi khalayak untuk menentukan pilihan. Selain itu PDIP Kabupaten Klaten juga tidak merambah ke wilayah akademis untuk melakukan sosialisasi kepartaian kepada sejumlah aktivis, akademisi, mahasiswa kampus dan lain sebagainya sehingga sulit untuk meraih surat suara secara maksimal. PDIP hanya fokus

kepada masyarakat atau kelompok yang sekiranya sepaham dengannya.

c. Minimnya hubungan dengan masyarakat

PDIP Kabupaten Klaten tidak banyak melakukan hubungan dengan masyarakat luas. Masyarakat banyak yang menganggap kedekatan hanya terjalin pada saat akan mendekati pesta demokrasi atau diselenggarakannya pemilu. Sehingga kedekatan yang terbangun tidak mendalam dan cepat hilang. *Follow up* dari PDIP Kabupaten Klaten kurang dirasakan oleh masyarakat seolah-olah PDIP datang kepada masyarakat hanya pada waktu-tertentu menjelang pemilu berlangsung. Hal semacam ini memang sering dijumpai di partai lain. Padahal hal semacam inilah yang menyebabkan masyarakat menganggap kedekatan partai kepada masyarakat hanyalah pencitraan demi kepentingan pemilu.

d. Kurangnya kekompakan

Walaupun Kabupaten Klaten dapat dikatakan kandang banteng/basis massa PDIP di wilayah Jawa Tengah akan tetapi di setiap sektor terjadi perbedaan kulture. Hal tersebut mempengaruhi perbedaan perolehan suara di setiap sektornya, loyalitas yang terjalin antara kader simpatisan dan masyarakat dipengaruhi oleh siapa yang memegang dan mengendalikannya. Masalah internal inilah salah satu yang menyebabkan kurangnya ke kompakannya di PDIP Kabupaten Klaten.

e. Kekuatan sektor yang tidak merata

Kedekatan kepada masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan kekuatan PDIP tidak merata disetiap sektornya. PDIP hanya terlalu memfokuskan gerakannya kepada pemilih loyal atau simpatisan yang jelas berpihak dengannya, sektor yang minim akan pendukung dan kader yang mempunyai peran besar dipartai kurang dimaksimalkan oleh PDIP. Kurang kuatnya jaringan diakar rumput juga menyebabkan tidak meratanya kekuatan PDIP.

f. Ruang lingkup yang sempit

Pemberian bantuan secara materil oleh PDIP Kabupaten Klaten yang berbentuk insfrastruktur dirasa kurang merata hanya sebagian masyarakat yang merasakan dampak dari bantuan tersebut dengan kata lain yang bisa merasakan bantuan tersebut hanyalah masyarakat sekitar tidak luas semua masyarakat bisa merasakan dan kebanyakan bantuan diberikan terhadap masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan pemangku kepentingan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Memasuki bab ke empat dan juga sebagai penanda bab terakhir dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan, saran, dan pesan penutup dari peneliti.

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari apa yang telah peneliti bahas di bab-bab sebelumnya menyimpulkan bahwa PDIP Kabupaten Klaten dalam meraih suara pemilih muslim pada pilgub Jawa Tengah 2018 ialah dengan memaksimalkan SDM yang dimiliki, PDIP Kabupaten Klaten menjadikan semua kader partai sebagai komunikator politik dari tingkatan paling bawah setingkat pengurus anak ranting hingga dibantu dengan kader ditingkat Nasional.

Dalam meraih simpati massa khususnya di kalangan umat muslim PDIP Kabupaten Klaten dibantu oleh BAMUSI sebagai gerakan sayap partai yang berlatar belakang Islam dan mendompleng nama besar KH Maimun Zubair untuk meraih simpati di kalangan umat Islam khususnya warga NU ditambah dengan bantuan kader partai yang masuk dalam ormas Islam.

Melalui berbagai saluran komunikasi politik seperti komunikasi massa, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi PDIP Kabupaten Klaten mencoba memanfaatkan semua saluran yang ada

semaksimal mungkin untuk meraih surat suara. Pergerakan kampanye yang dilakukan PDIP Kabupaten Klaten melalui berbagai metode dan pendekatan baik secara struktur maupun sosial kultur dilakukan secara individu dan kolektif dalam bentuk pertemuan secara langsung *face to face*, dialog, pengajian maupun melalui bantuan saluran/alat yang berupa media.

PDIP Kabupaten Klaten juga tak terlepas dari hambatan yang dialami mulai dari hambatan yang datang dari internal maupun eksternal partai diantaranya citra buruk partai dimasyarakat, *black campaign*, hoax dan kasus korupsi yang menimpa Bupati Klaten dan dugaan kasus korupsi dana e-ktip yang dituduhkan kepada petahana Ganjar Pranowo.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan kepada DPC PDIP Kabupaten Klaten setelah meneliti dan mengamati jalannya kampanye atau kegiatan yang dalam meraih surat suara ialah pertama, kurangnya memaksimalkan media massa yang mereka miliki sebagai alat bantu untuk meraih dukungan massa tanpa terhalang jarak dan waktu seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal baik untuk meraih dukungan maupun untuk memerangi *black campaign*. Kedua, melakukan pendekatan dengan para profesional/promotor karena selain profesional mempunyai masa yang banyak mereka juga bisa mengiring opini publik. Terakhir, seyogyanya PDIP Kabupaten Klaten meningkatkan

kreadibilitas partai dan anggotanya, agar citra partai yang selama ini negatif akan perlahan hilang dengan sendirinya dan kepercayaan masyarakatpun akan meningkat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, setelah melalui beberapa proses yang panjang peneliti dapat mengolah dan menuliskan semaksimal mungkin hasil yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik secara penulisan kata maupun pendalaman masalah, maka dari itu peneliti menerima seluas-luasnya kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antar Venus, *Managemen Kampanye*. Bandung: Simbios Media, 2004.
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik; Filsafat-Teori-Tujuan-Strategidan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik; Konsep,Teori dan Strategi*. Depok: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Creswell, John C, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dulah Sayuti, Solatun, *Komunikasi Pemasaran Politik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Dan Nimmo. *Komunikasi politik: Khalayak dan Efek*. Penerj Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Penerj: Tjun Sujarman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hutomo, Ridho Satrio, *Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilisasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Junaedi, Fajar, *Komunikasi Politik; Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera, 2013.
- Littlejohn, Stephen W, *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammda, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- , *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.
- Ridlo, Mochammad Rifqi, *Strategi Komunikasi Politik dalam Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Tegal*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar, Ed. Bahasa Indonesia*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Saputra, Debie Pratama, *Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Menuju Pemilu 2014 di Kabupaten Kubar*, Jurnal, Vol, 3 (3): 170-184, 2015.
- Thaha, Idris. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Uber, Fahri. *Strategi Kampanye calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Satu Kabupaten Minahasa Utara 2014*, Jurnal, Volume V. No.2, 2016.

Yugha, Tim Divaro. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

**Website:**

<https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/192813-daftar-daerah-pilkada-2018>.

Diakses pada 8 maret 2018

<http://www.demokrasi.co/2018/01/survey-terbaru-lsi-pdip-mengalami.html?m=1>. Diakses

pada 9 Maret 2018

<https://viva.co.id/berita/politik/1004645-disebut-oki-elektabilitas-pdip-turun-drastis>.

Diakses pada 9 Maret 2018.

<https://www.merdeka.com/politik/kpu-jateng-ganjar-heru-menang-dengan-4882-persen-suara.html>. Diakses pada 8 maret 2018

<https://m.liputan6.com/news/read/2835928/ini-isi-pidato-megawati-yang-dilaporkan-lsm-ke-bareskrim>. Diakses pada 9 Maret 2018.

<https://nusantara.rmol.co/2018/01/13/322181/warna-pilkad-jawa-tengah-bakal-adopsi-kampanye-jakarta>. Diakses pada 9 Maret 2018.

<https://kpu-klatenkab.go.id/rapat--pleno-terbuka-hasil-suara-pilgub-jateng-2018/> Diakses pada 27 Agustus 2018.

<https://soloraya.solopos.com/read/20161202/493/773404/demo-2-desember-ratusan-umat-islam-klaten-ke-jakarta-demi-212>. Diakses pada 9 Mei 2019.

<https://tirto.id/menghitung-lumbung-suara-pilgub-jawa-tengah-CHZc>. Diakses pada 9 Mei 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.8.1/2018

This is to certify that:

Name : **Muhamad Wisnu Haidir**  
Date of Birth : **September 19, 1994**  
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)  
held on **November 23, 2018** by Center for Language Development of State  
Islamic University Sunan Kalijaga:

| CONVERTED SCORE                |            |
|--------------------------------|------------|
| Listening Comprehension        | 37         |
| Structure & Written Expression | 41         |
| Reading Comprehension          | 43         |
| <b>Total Score</b>             | <b>403</b> |

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, November 23, 2018  
Director

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005



## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.21.0./2018

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Muhamad Wisnu Haidir :

تاريخ الميلاد : ١٩ سبتمبر ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ أبريل ٢٠١٨، وحصل على  
درجة :

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| ٤٢  | فهم المسموع                           |
| ٣٢  | التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية |
| ٣١  | فهم المقروء                           |
| ٣٥٠ | مجموع الدرجات                         |

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٩ أبريل ٢٠١٨  
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



Nomor: UTN.02.R3.PP.00.9.3074.2014



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : MUHAMMAD WISNU HAIDIR  
NIM : 14210094  
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

## **SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015

Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2014

a.n. Rektor

M. N. Rektor Bidang Kembangan dan Kerjasama





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Pusat Teknologi Informasi dan Pangan Data

# SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3 PP.00.9/21.10.19 2018

## UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Muhamad Wisnu Haidir  
NIM : 14210094  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan/Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam  
Dengan Nilai :

| No.                | Materi                | Nilai     |       |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------|
|                    |                       | Angka     | Huruf |
| 1.                 | Microsoft Word        | 100       | A     |
| 2.                 | Microsoft Excel       | 40        | E     |
| 3.                 | Microsoft Power Point | 90        | A     |
| 4.                 | Internet              | 100       | A     |
| 5.                 | Total Nilai           | 82.5      | B     |
| Predikat Kelulusan |                       | Memuaskan |       |

Yogyakarta, 5 November 2018

Menteri Kepala PTIPD



Dip. Shafwatu Uyun, S.T., M.Kom.  
NIP. 39620511 200604 2 002

| Standar Nilai |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| Angka         | Huruf | Predikat         |
| 86 - 100      | A     | Sangat Memuaskan |
| 71 - 85       | B     | Memuaskan        |
| 56 - 70       | C     | Cukup            |
| 41 - 55       | D     | Kurang           |
| 0 - 40        | E     | Sangat Kurang    |





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281  
email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- / Un.02/DD.4/TU.00/11/2018  
*494*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhamad Wisnu Haidir  
Nomor Induk Mahasiswa : 14210094  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan / Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Berdasarkan surat keterangan ini, bahwasannya mahasiswa tersebut di atas telah mengikuti ujian susulan ibadah sholat dan baca tulis al-Qur'an (BTQ) pada hari Selasa, 13 November 2018 dengan predikat lulus (skor: 80). Surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai syarat pendaftaran munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 November 2018

a.n Dekan

Dekan Bidang Kemahasiswaan

nama





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

شهادة  
**SERTIFIKAT**

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.764/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga  
memberikan sertifikat kepada:

Nama : Muhamad Wisnu Haidir  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Klaten, 19 September 1994  
Nomor Induk Mahasiswa : 14210094  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,  
Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : sawahan, BANARAN  
Kecamatan : Galur  
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dan tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,87 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata  
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian  
Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017  
Ketua  
  
Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. : 19720912 200112 1 002

## FORM CV

Nama Lengkap : Muhamad Wisnu Haidir  
Tempat tanggal lahir : Klaten, 19 September 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : WNI  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Alamat : Tegalmas, Prawatan, Jogonalan, Klaten.  
No HP : 085647414323  
Email : wisnuhaidir@gmail.com

### Pendidikan Formal:

- ❖ **SD Negeri Tangkisan Pos** : 2001-2007
- ❖ **MTs Al Muttaqien P.S** : 2007-2010
- ❖ **SMA Negeri 1 Petanahan** : 2010-2013
- ❖ **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** : 2014-2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA